



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
RISIKO STRATEGIS DAN RISIKO OPERASIONAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara optimal, perlu menetapkan risiko strategis dan risiko operasional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Risiko Strategis dan Register Risiko Operasional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Internal Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 39 Tahun 2024 tentang Struktur Manajemen Risiko Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RISIKO STRATEGIS DAN RISIKO OPERASIONAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Menetapkan risiko strategis dan risiko operasional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
a. register Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP;
b. penilaian serta pemetaan Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP; dan
c. rencana tindak pengendalian (RTP) Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP;
yang akan dipergunakan oleh Struktur Manajemen Risiko BPIP sebagai acuan dalam penilaian risiko tujuan sesuai dengan rencana strategis serta mekanisme proses bisnis kinerja.

KETIGA : Pelaksanaan Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan semua unit pemilik risiko, melalui pola kerja dan kontrol hubungan dalam Struktur Manajemen Risiko BPIP sebagai berikut:
a. Sekretaris Utama selaku Komite Pengelolaan Risiko, mengoordinasikan susunan register risiko strategis dan register risiko operasional serta rencana tindak pengendalian Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP;
b. Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Risiko Strategis, bertugas membantu Sekretaris Utama dalam mengoordinasikan penilaian atas risiko strategis BPIP;
c. Biro Hukum dan Organisasi selaku Kelompok Kerja Pengelolaan Risiko Operasional, bertugas membantu Sekretaris Utama dalam mengoordinasikan penilaian atas risiko operasional BPIP; dan
d. Biro Pengawasan Internal selaku Ketua Kelompok Kerja Penjaminan Kualitas, bertugas membantu Sekretaris Utama dalam melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian risiko melalui penilaian dan pemetaan atas Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP secara berkala yang termuat dalam kertas kerja penilaian dan pemetaan atas risiko sesuai dengan kode risiko dan peta risiko yang telah ditentukan.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai penyelenggaraan Risiko Strategis dan Risiko Operasional BPIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS UTAMA,




TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
NOMOR 15 TAHUN 2024
RISIKO STRATEGIS DAN RISIKO OPERASIONAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. PENETAPAN REGISTER RISIKO STRATEGIS BPIP

Koordinator : Kelompok Kerja Pengelolaan Risiko Strategis
Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Pemilik Risiko : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

A.1. REGISTER RISIKO STRATEGIS BPIP

No	Sasaran	Program	Target IKSS		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	PIC
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan (PerUU)	Program Revitalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan melalui kegiatan: 1. Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila; 2. Analisis dan Penyelarasan Hukum, serta Advokasi dan Pengawasan Regulasi; 3. Pengkajian Kebijakan dan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila; dan 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Persentase implementasi peta jalan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	Fungsi koordinasi internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan Pembangunan Nasional dan PerUU tidak dapat dilaksanakan oleh BPIP	Kedudukan BPIP dalam Peraturan Presiden (Perpres) bukan sebagai koordinator	Penguatan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPIP	Sekretaris Utama

No	Sasaran	Program	Target IKSS		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	PIC
1	2	3	4		5	6	7	8
					Eksistensi kelembagaan BPIP	Kekuatan kelembagaan BPIP hanya diatur dalam Perpres	Penguatan Pelembagaan BPIP dalam UU	Sekretaris Utama
							Pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
							Pemanfaatan strategi komunikasi dan kerja sama yang efektif	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
					Nilai-Nilai Pancasila tidak terlembaga dalam kebijakan Pembangunan Nasional dan Perundang-undangan	Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila tidak dilaksanakan secara optimal oleh BPIP	Rekomendasi hasil Penyelarasan dan Kajian atas rancangan PerUU dan kebijakan Rekomendasi advokasi PIP	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
							Penyusunan Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
							Penyelenggaraan Diklat PIP bagi Aparatur Negara	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
						Standar Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan PIP	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
					BPIP tidak memiliki indikator nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan Nasional	Belum adanya kesamaan persepsi terhadap internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila	Penyusunan Indikator nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan Nasional	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
2	Terwujudnya praktik luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Program Revitalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan melalui kegiatan:	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	78 s.d 87	Nilai-nilai Pancasila tidak digunakan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	- Tergerusnya nilai, moral, dan budaya pemahaman mengenai Pancasila - Tergerusnya nilai, moral, dan	Pelaksanaan PIP melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu	Deputi Bidang lingkup BPIP

No	Sasaran	Program	Target IKSS		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	PIC
1	2	3	4		5	6	7	8
						budaya pemahaman mengenai Pancasila - Kurangnya keteladanan atas Kepemimpinan Nasional - Penyampaian sosialisasi atas internalisasi Pancasila yang kurang menarik - Masuknya pemahaman ideologi lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila		
3	Terwujudnya kinerja BPPIP yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas	Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Pemerintahan.	- Nilai Reformasi Birokrasi - Nilai SAKIP - Opini LK BPK - Indeks Sistem Merit - Indeks Profesionalitas ASN	70 s.d 86 A WTP 0,79 s.d 0,87 66,87 s.d 75,75	Target tidak tercapai sesuai ketentuan IKSS	- Data dukung Reformasi Birokrasi (RB) tidak memenuhi kriteria penilaian; - Indikator kinerja tidak SMART - Temuan berulang tidak ditindaklanjuti; - Tidak ada pengelolaan Manajemen kinerja; - Tidak ada pengelolaan Manajemen Talenta;	- Koordinasi lintas unit kerja dalam pemenuhan data dukung; - Perubahan Rencana Strategis dengan melibatkan Bappenas; - Penguatan fungsi manajemen keuangan dan pengawasan; - Penguatan implementasi manajemen kinerja; - Implementasi pelaksanaan manajemen talenta;	Sekretaris Utama

No	Sasaran	Program	Target IKSS		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	PIC
1	2	3	4		5	6	7	8
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85% s.d 95%		- Fungsi layanan tidak terpadu secara elektronik.	- Peningkatan nilai fungsi Aplikasi dan pengelola	

A.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO STRATEGIS BPIP

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fungsi koordinasi internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan Pembangunan Nasional dan Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan oleh BPIP	Kedudukan BPIP dalam Perpres bukan sebagai koordinator	3	4	12	- Revisi OTK dan Rencana Strategis BPIP - Pengesahan Proses Bisnis BPIP	- Evaluasi Capaian Rencana Strategis - Evaluasi berkala proses bisnis BPIP	Semester I dan II	- Dokumen evaluasi renstra beserta perubahan informasi kinerja (informasi pengukuran kinerja) - Dokumen evaluasi implementasi probis secara berkala	Sekretaris Utama	
						- Pengesahan Peraturan BPIP No.4/2024 tentang Arah Kebijakan PIP	- Peraturan Presiden tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029	Semester I dan II	- Peraturan BPIP tentang GBHIP dan Peta Jalan	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	
						- Menjalin kerjasama PIP dengan K/L lain - Pengesahan Peraturan BPIP tentang Pedoman Kerjasama PIP - Menyelenggarakan Sosialisasi Pancasila	- Membentuk Bakorkerma (badan koordinasi kerjasama dengan K/L lain) - Membentuk kerjasama dengan Perguruan tinggi pada mahasiswa penggerak Pancasila (KKN tematik Pancasila) - Pembentukan sarana kerjasama dan database kerjasama antar lembaga berbasis elektronik;	Semester I dan II	- Database rencana aksi serta realisasi program kerjasama antar lembaga; - Jumlah mahasiswa dan tenaga pendidik dalam melaksanakan internalisasi PIP melalui kuliah kerja nyata; - Aplikasi siHaker (Aplikasi hubungan antar lembaga dan kerjasama);	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
							<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman dan Standar pelaksanaan Kerjasama PIP; - Penyelenggaraan serta evaluasi pelaksanaan Sosialisasi Pancasila 		<ul style="list-style-type: none"> - Juknis dan SOP pelaksanaan Kerjasama PIP; - Maturitas hasil evaluasi pelaksanaan Sosialisasi Pancasila 		
2	Kelembagaan BPIP Hilang	Kekuatan kelembagaan BPIP hanya diatur dalam Perpres	1	5	5	<ul style="list-style-type: none"> - Pencantuman RUU BPIP dalam Program Legislasi Nasional (ProLegnas) DPR; - Penyusunan Naskah Akademik ke Kementerian Hukum dan HAM c.q. BPHN 	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi penyusunan Naskah Akademik RUU BPIP; - Pembahasan RUU dengan DPR. 	Semester I dan II	Dokumen Naskah Akademik RUU BPIP serta Notulensi hasil pembahasan bersama DPR	Sekretaris Utama	
3	Nilai-Nilai Pancasila tidak terlembaga dalam kebijakan Pembangunan Nasional dan Perundang-undangan	Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila tidak dilaksanakan secara optimal oleh BPIP	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Rekomendasi Institusionalisasi Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rekomendasi atas hasil penyalarsan, - Tindak lanjut rekomendasi atas hasil kajian, dan - Tindak lanjut rekomendasi atas hasil advokasi 	Semester I dan II	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Per-UU yang selaras dengan indikator nilai Pancasila; - Terinternalisasi nya dan terinstitusionalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan Per-UU; - Terlaksananya PIP dalam Per-UU 	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	
						<ul style="list-style-type: none"> - Pengesahan Peraturan BPIP No.4/2024 tentang Arah Kebijakan PIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan mengenai Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 	Semester I dan II	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan/Program/kegiatan K/L/Pemda dalam peta jalan PIP yang dilaksanakan 	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
						- Menyelenggarakan Diklat PIP bagi ASN dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP di K/L/D Serta Universitas	- Penyelenggaraan Diklat PIP bagi Anggota Legislatif; - Diklat PIP bagi Kepala Desa; - Diklat PIP bagi ASN dan anggota TNI/Polri; - Diklat PIP bagi komunitas.	Semester I dan II	- Persentase peserta Diklat yang melakukan aktualisasi	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
						- Melakukan Monev PIP secara berkala	- Penilaian atas maturitas pengendalian dan maturitas evaluasi PIP di lingkungan BPIP	Semester I dan II	- Maturitas Pengendalian dan maturitas Evaluasi Pelaksanaan PIP yang berstandar	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
4	BPIP tidak memiliki indikator nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan Nasional	Belum adanya kesamaan persepsi terhadap internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila	1	5	5	- Pengesahan Peraturan BPIP mengenai Indikator Nilai Pancasila	- Internalisasi indikator nilai Pancasila dalam produk hukum kepada perancang per-UU, Analisis Hukum dan Akademisi	Semester I dan II	- Jumlah per-UU yang diselaraskan; - Jumlah per-UU yang dievaluasi/kaji	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	
						- Penilaian Indikator Aktualisasi Pancasila (IAP)	- Mendorong IAP menjadi Indeks Capaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah melalui rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri; - Diseminasi dan Akseptasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila kepada K/L/Pemda	Semester I dan II	- Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) termuat dalam rencana struktur K/L/Pemda; - Tindak lanjut rekomendasi hasil pengukuran Pelembagaan Pancasila kepada K/L/P	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
5	Nilai-nilai Pancasila tidak digunakan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	- Tergerusnya nilai, moral, dan budaya pemahaman mengenai Pancasila	2	4	8	- Penyelenggaraan kegiatan Hari Lahir Pancasila	- Penyelenggaraan Harlah Pancasila di lokasi bertema Pancasila;	Semester I dan II	- Siaran langsung/ <i>streaming</i> penyelenggaraan Harlah Pancasila di media sosial;	Sekretaris Utama	
		- Kurangnya keteladanan atas Kepemimpinan Nasional				Sosialisasi Pancasila dengan mengundang DPR	- Penguatan kegiatan relawan kebajikan Pancasila;		- Kelompok masyarakat (Pokmas) relawan kebajikan Pancasila yang telah menerima sosialisasi pembudayaan Pancasila	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;	
		- Adanya pertukaran budaya global yang tidak disertai dengan ketahanan budaya yang tangguh dapat menggerus nilai luhur budaya bangsa				- Advokasi PIP dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan (Kerjasama dengan Staf Khusus Presiden);	- Advokasi PIP di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);		- Rekomendasi advokasi PIP;	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi;	
		- Penyampaian sosialisasi atas internalisasi Pancasila yang kurang menarik				- Menyusun Buku Teks Utama (BTU) Pancasila bagi satuan pendidikan:	- Monitoring dan evaluasi pemanfaatan BTU pada satuan pendidikan di bawah Kemendikbud, Kemenag;		- Rekomendasi pemanfaatan BTU pada satuan pendidikan yang telah memanfaatkan di 12 lokasi Provinsi sebagai wilayah percontohan;	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;	

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
		- Masuknya pemahaman ideologi lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila				- Menyelenggarakan Diklat PIP dengan berbagai elemen masyarakat, ASN, dan Personel TNI/POLRI;	- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat PIP dengan berbagai elemen masyarakat, ASN, dan Personel TNI/POLRI;		- Sertifikasi Diklat PIP dengan berbagai elemen masyarakat, ASN, dan Personel TNI/POLRI;	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;	
						- Pelaksanaan pengendalian atas program PIP	- Monitoring hasil pengendalian atas program PIP		- Rekomendasi hasil pengendalian atas program PIP.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
6	Target tidak tercapai sesuai ketentuan IKSS	- Data dukung RB tidak memenuhi kriteria penilaian;	3	5	15	- Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara berkala	- Tindak lanjut rencana aksi reformasi birokrasi;	Semester I dan II	- Peningkatan nilai evaluasi reformasi birokrasi;	Sekretaris Utama	
		- Indikator kinerja tidak SMART				- Pelaksanaan Evaluasi SPIP setiap tahun	- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP;		- Peningkatan nilai evaluasi AKIP;		
						- Menyelenggarakan Monev oleh Biro Renkeu secara berkala	- Perubahan Rencana Strategis dengan melibatkan Bappenas;		- Perubahan Peraturan BPIP tentang Renstra BPIP;		
		- Temuan berulang tidak ditindaklanjuti;				- Menetapkan kebijakan pengelolaan aset melalui SE Sestama;	- Penguatan fungsi manajemen keuangan dan pengawasan;		- Layanan pelaporan Keuangan yang akuntabel;		
		- Tidak ada pengelolaan Manajemen kinerja;				- Menetapkan pedoman pengelolaan kinerja melalui SK Kepala;	- Penguatan implementasi manajemen kinerja;		- Layanan pelaporan pengawasan internal;		
		- Tidak ada pengelolaan Manajemen Talenta;				- Menetapkan Peraturan BPIP tentang Manajemen Talenta;	- Implementasi pelaksanaan manajemen talenta;		- Layanan pelaksanaan manajemen talenta;		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
		- Fungsi layanan tidak terpadu secara elektronik				- Penetapan Peraturan BPIP tentang SPBE di lingkungan BPIP.	- Peningkatan nilai fungsi Aplikasi dan pengelola		- Layanan pengelolaan data dan informasi.		

B. PENETAPAN REGISTER RISIKO OPERASIONAL BPIP

Koordinator : Kelompok Kerja Pengelolaan Risiko Strategis
 Unit Kerja : Biro Hukum dan Organisasi (c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana)
 Pemilik Risiko : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

B.1.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL SEKRETARIAT UTAMA

Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
Program Dukungan Manajemen	Tingkat Kepuasan Internal BPIP terhadap Layanan Dukungan Manajemen	100%	Terdapat kebijakan eksternal yang mempengaruhi organisasi	Kebijakan nasional oleh Kementerian lain	Penyesuaian Alokasi Anggaran	Sekretaris Utama
			Indikator Kinerja tidak mencapai target	Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal	Pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Rapat Terbatas secara berkala	
			Temuan Pemeriksa dan/atau auditor internal	Pengendalian intern yang tidak efektif	Penguatan SPIP dan Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	
			Laporan Kinerja Organisasi terlambat disampaikan	keterlambatan unit kerja menyampaikan laporan kinerja	Penyampaian Nota Dinas dan Penguatan Koordinasi antar Unit Kerja	
			Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Kebijakan eksternal dan perubahan rencana strategis	Penguatan Proses Bisnis dan Budaya Kerja	

B.1.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL SEKRETARIAT UTAMA

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terdapat kebijakan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan anggaran organisasi	Kebijakan nasional oleh Kementerian lain	2	4	8	Penyesuaian Alokasi Anggaran dan menjalin koordinasi antar unit kerja	- Reviu Anggaran oleh Biro Pengawasan Internal - Penguatan Manajemen Kinerja - Pemberian Diklat kepada pegawai	Semester I dan II	Regulasi	Semester I dan II	-
2	Indikator Kinerja tidak mencapai target	Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal	2	4	8	Penyesuaian Indikator Informasi Kinerja	- Pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Rapat Terbatas secara berkala - Monitoring dan Evaluasi oleh Biro Renkeu dan Wasnal	Semester I dan II	Dokumen Notulensi Rapat dan Laporan Monitoring dan Evaluasi		
3	Temuan Pemeriksa dan/atau auditor internal	Pengendalian intern yang belum optimal	3	4	12	Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK	Penguatan SPIP dan Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK berkala	Semester I dan II	Penilaian Maturitas SPIP dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan		
4	Laporan Kinerja Organisasi terlambat disampaikan	Keterlambatan unit kerja menyampaikan laporan kinerja	1	4	4	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja	Penyampaian Nota Dinas dan Penguatan Koordinasi antar Unit Kerja	Semester I dan II	Dokumen Laporan Kinerja		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Kebijakan eksternal dan perubahan rencana strategis	1	5	5	Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan	Penguatan Proses Bisnis dan Budaya Kerja	Semester I dan II	Regulasi		

B.2.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan sesuai Standar	100%	Penyusunan Rencana Kerja tidak tepat waktu	Tanggapan unit kerja terlambat	Pelaksanaan Rapat Teknis Perencanaan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
					Dokumen Perencanaan tidak sesuai standar	- Proses pengesahan nota dinas oleh pimpinan unit kerja yang terlambat - Kebijakan eksternal organisasi		
					Aplikasi tidak dapat digunakan	Adanya perawatan oleh pengelola Aplikasi SAKTI	Komunikasi kepada Kementerian Keuangan sehingga data yang tersimpan tidak hilang	
					Penyampaian data eksternal terlambat	Detail pencatatan barang BMN terlambat disampaikan	Berkoordinasi dengan Bagian BMN dan PPK mengenai pencatatan aset dan barang persediaan	
					Penyusunan Laporan Kinerja tidak tepat waktu Laporan Kinerja tidak tersusun	Keterlambatan penyampaian laporan kinerja dari unit kerja	Penguatan Fungsi Manajemen Kinerja melalui Dialog Kinerja	

B.2.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyusunan Rencana Kerja tidak tepat waktu	Tanggapan unit kerja terlambat	2	5	10	Perbaikan data	Pelaksanaan Rapat Teknis Perencanaan	Semester I dan II	Dokumen Laporan Kegiatan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	
2	Dokumen Perencanaan tidak sesuai standar	- Proses pengesahan nota dinas oleh pimpinan unit kerja yang terlambat - kebijakan eksternal organisasi	4	5	20	Penelaahan internal dan berkoordinasi lintas unit kerja secara terjadwal		Semester I dan II				
3	Aplikasi tidak dapat digunakan	Adanya perawatan oleh pengelola Aplikasi SAKTI	2	5	10	Kontak SITP dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan	Penyusunan Linimasa pelaporan keuangan	Semester I dan II				Layanan Pelaporan Keuangan
4	Penyampaian data eksternal terlambat	Detail pencatatan barang BMN terlambat disampaikan	2	5	10	Melakukan rekonsiliasi data dengan Bagian BMN dan PPK	Meminta Bagian Barang Milik Negara untuk menjalin koordinasi dengan PPK mengenai pencatatan aset dan persediaan	Semester I dan II				Dokumen Laporan Keuangan
5	Penyusunan Laporan Kinerja tidak tepat waktu	Keterlambatan penyampaian	3	3	9	Monitoring Penyampaian Laporan Kinerja	Rapat Koordinasi Antar Unit Kerja	Semester I dan II				Dokumen Laporan Rapat

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laporan kinerja dari unit kerja									
6	Laporan Kinerja tidak tersusun	Kurangnya kapasitas SDM dan unit kerja belum memahami ketentuan dan format dari Kemenpan RB	2	3	6	- Memberikan contoh template Laporan Kinerja sesuai Format dari Kemenpan RB - Sosialisasi Rapat Penyusunan Laporan Kinerja		Semester I dan II			

B.3.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja	Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)	
1	Terlaksananya Layanan Kerumahtanggaan, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Manajemen Sumber Daya Manusia kepada Unit Kerja	Program Dukungan Manajemen	Persentase Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kerumahtanggaan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	100%	Barang Milik Negara Rusak dan/atau Hilang	Pegawai yang diberikan penggunaan tidak melakukan perawatan dan penggunaan dengan baik	Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan BMN dan Pelaporan Belanja Modal/Aset dan Proses Pelaksanaan Inventarisasi Aset	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
					Penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses pengadaan	Belum maksimalnya pengadaan secara elektronik	Penggunaan Layanan Pengadaan secara elektronik	
					Kesalahan dalam penyusunan HPS, kontrak pengadaan, dan spesifikasi	Perencanaan yang tidak efektif dan tidak sesuai kebutuhan	Pelaksanaan Survei Kebutuhan dan Perencanaan atas BMN	
					Nilai Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN tidak mencapai target	Kesulitan pemenuhan data dukung	Penyampaian Nota Dinas kepada unit kerja dan monitoring pemenuhan data dukung	
					Unit kerja tidak terfasilitasi layanan BMN, Kerumahtanggaan dan Sumber Daya Manusia	Tidak melakukan inventarisasi kebutuhan dari unit kerja	Pelaksanaan Survei dan Inventarisasi Kebutuhan	

B.3.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Barang Milik Negara Rusak dan/atau Hilang	Pegawai yang diberikan penggunaan tidak melakukan perawatan dan penggunaan dengan baik	4	5	20	Penerapan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 9 Tahun 2020	Penanganan menggunakan asuransi terhadap beberapa Barang Milik Negara dan Implementasi Peraturan BPIP tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara	Semester I dan II	Regulasi Pengasuransi an BMN	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	-
2	Penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses pengadaan	Belum maksimalnya pengadaan secara elektronik	1	5	5	Peningkatan kompetensi SDM dan Penerapan Peraturan BPIP tentang Pengendalian Gratifikasi	Penguatan Fungsi Pengaduan dan Penerapan Pengadaan secara elektronik	Semester I dan II	Layanan Pengadaan berbasis elektronik		
3	Kesalahan dalam penyusunan HPS, kontrak pengadaan, dan spesifikasi	Perencanaan yang tidak efektif dan tidak sesuai kebutuhan	2	5	10	Reviu Pengajuan Pengadaan oleh PPK dan Panitia Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Refreshment Peraturan Pengadaan - Penyusunan Linimasa Rencana Pengadaan - Pelaksanaan Survei Kebutuhan BMN 	Semester I dan II	Layanan Pelaporan Keuangan		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Nilai Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN tidak mencapai target	Kesulitan pemenuhan data dukung	3	4	12	Penyampaian Nota Dinas Permintaan Data Dukung	Sosialisasi Penilaian Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN kepada seluruh unit kerja dan optimalisasi peran Tata Usaha	Semester I dan II	Dokumen Laporan Keuangan		
5	Unit kerja tidak terfasilitasi layanan BMN, Kerumahtanggaan dan Sumber Daya Manusia	Tidak melakukan inventarisasi kebutuhan dari unit kerja	1	3	3	Penyampaian Nota Dinas Pengajuan Kebutuhan BMN dan Layanan SDM kepada unit kerja	Survei Kebutuhan BMN dan Layanan SDM kepada unit kerja	Semester I dan II	Dokumen Laporan Rapat		

B.4.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADMINISTRASI

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
1	Terlaksananya Dukungan Teknis dan Administrasi, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan bagi Pimpinan	Program Dukungan Manajemen	Persentase Kepuasan Unsur Pimpinan terhadap Dukungan Layanan Keprotokolan dan Administrasi yang diberikan	100%	Unsur Pimpinan tidak puas terhadap layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Keterbatasan SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki SOP Layanan Protokol dan administrasi yang sudah ada - Pelaksanaan <i>Benchmark/</i> studi banding 	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi
					Pelayanan administrasi Unsur Pimpinan tidak tertib dan tidak optimal	Belum adanya SOP Pelayanan Administrasi	Penyusunan SOP Pelayanan Administrasi	
					Agenda Rapat Unsur Pimpinan tidak terstruktur	Keterbatasan SDM	Perbaiki SOP Pelaksanaan Rapat Pimpinan	
			Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik BPIP	65 s.d. 66	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak mencapai target	Kesulitan pemenuhan data dukung	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik - Penyampaian Nota Dinas kepada unit kerja terkait Layanan Data dan Informasi - <i>Benchmark/</i>studi banding 	
					Pengaduan Masyarakat tidak ditindaklanjuti	Keterbatasan SDM dan belum adanya SOP Pengaduan Masyarakat	Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat	
					Penyampaian Informasi publik tidak akurat	Belum adanya SOP Pengaturan Penyampaian informasi kepada publik	Penyusunan SOP Penanganan Penyampaian Informasi Publik	
		Nilai Pengawasan Kearsipan	65 s.d 66	Nilai Pengawasan Kearsipan tidak mencapai target	Belum tersedianya sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan SDM dalam penyediaan sarana pengelolaan arsip 		

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
						pendukung pengelolaan arsip	- Pengembangan Aplikasi Monitoring Arsip	
					Pengelolaan Arsip tidak sesuai standar	Belum tersedianya ruang kerja arsiparis dan ruangan pengelolaan arsip	Penyediaan Ruang Kerja Arsiparis dan Ruang Pengelolaan arsip	

B.4.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADMINISTRASI

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Unsur Pimpinan tidak puas terhadap layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Keterbatasan SDM	3	4	12	Penugasan pegawai untuk mengikuti Diklat Protokol	- Perbaiki SOP Layanan Protokol dan administrasi yang sudah ada - Pelaksanaan <i>Benchmark/</i> studi banding	Semester I dan II	SOP/Petunjuk Pelaksanaan	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	-
2	Pelayanan administrasi Unsur Pimpinan tidak tertib dan tidak optimal	Belum adanya SOP Pelayanan Administrasi	2	3	6	Digitalisasi dokumen	Penyusunan SOP Pelayanan Administrasi	Semester I dan II	SOP/Petunjuk Pelaksanaan		
3	Agenda Rapat Unsur Pimpinan tidak terstruktur	Keterbatasan SDM	2	4	8	Menyusun agenda rapat sebelum pelaksanaan rapat dimulai	Perbaiki SOP Pelaksanaan Rapat Pimpinan	Semester I dan II	SOP/Petunjuk Pelaksanaan		
4	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak mencapai target	Kesulitan pemenuhan data dukung	2	3	6	Penyampaian Nota Dinas Permintaan Data Dukung	- Sosialisasi Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik - Penyampaian Nota Dinas kepada unit kerja terkait Layanan Data dan Informasi	Semester I dan II	Dokumen Laporan Kegiatan		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
							- <i>Benchmark/</i> studi banding				
5	Pengaduan Masyarakat tidak ditindaklanjuti	Keterbatasan SDM dan belum adanya SOP Pengaduan Masyarakat	2	5	10	Integrasi layanan pengaduan ke aplikasi LAPOR!	Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat	Semester I dan II	SOP/Petunjuk Pelaksanaan		
6	Penyampaian Informasi publik tidak akurat	Belum adanya SOP Pengaturan Penyampaian informasi kepada publik	1	5	5	Kerjasama dengan media massa	Penyusunan SOP Penanganan Penyampaian Informasi Publik	Semester I dan II	SOP/Petunjuk Pelaksanaan		
7	Nilai Pengawasan Kearsipan tidak mencapai target	Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip	2	4	8	- Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada - Evaluasi Penilaian Pengawasan Kearsipan	- Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan SDM dalam penyediaan sarana pengelolaan arsip - Pengembangan Aplikasi Monitoring Arsip	Semester I dan II Tahun Berjalan	Dokumen Laporan Pengawasan Kearsipan		
8	Pengelolaan Arsip tidak sesuai standar	Belum tersedianya ruang kerja arsiparis dan ruangan pengelolaan arsip	3	2	6	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada	Penyediaan Ruang Kerja Arsiparis dan Ruang Pengelolaan arsip	Semester I dan II Tahun Berjalan	Layanan Pengelolaan Arsip		

B.5.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
1	Terlaksananya Koordinasi Produk Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Persentase Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti	100%	Rancangan Produk Hukum tidak ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Produk hukum tidak mendapat izin pimpinan atau tidak masuk Program Penyusunan - Proses harmonisasi di Kementerian hukum dan HAM atau Sekretariat Kabinet 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melibatkan Sekretariat Kabinet dalam Rapat pelaksanaan harmonisasi - Asistensi Penyusunan Program Penyusunan Produk Hukum 	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
					Rancangan Produk hukum tidak sesuai ketentuan yang berlaku	keterbatasan kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan keikutsertaan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan - Mengikuti kursus singkat penyusunan peraturan perundang-undangan dan kontrak/kerja sama 	
					Penyusunan Produk Hukum tidak sesuai target penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan produk hukum dari unit kerja pemrakarsa belum memenuhi substansi - Unit kerja pemrakarsa tidak memiliki waktu untuk penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Nota Dinas secara berkala kepada unit kerja pemrakarsa - Penmbuatan Rapat Koordinasi Penyelarasan dengan Unit Kerja Pemrakarsa 	

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
			Persentase Rekomendasi Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	100%	Rekomendasi Penataan Organisasi tidak ditindaklanjuti	Kebijakan eksternal organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Survei Kebutuhan Organisasi - Penyusunan Analisis Kebutuhan Organisasi 	
					Nilai Reformasi Birokrasi tidak mencapai target	kesulitan pemenuhan data dukung	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Benchmark</i>/studi banding - Pembuatan Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala 	

B.5.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rancangan Produk Hukum tidak ditindaklanjuti	- Penyusunan Produk hukum tidak mendapat izin pimpinan atau tidak masuk Program Penyusunan - Proses harmonisasi di Kementerian hukum dan HAM atau Sekretariat Kabinet	2	4	8	- Sosialisasi Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 dan kerangka regulasi dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 - Penyediaan Salinan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 di website JDIH BPIP - Pengiriman memorandum kepada unit kerja secara berkala dalam rangka mengingatkan untuk pengusulan Prosun Peraturan BPIP	- Berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melibatkan Sekretariat Kabinet dalam Rapat pelaksanaan - Asistensi Penyusunan Program Penyusunan Produk Hukum	Semester I dan II	Dokumen Laporan Rapat dan Kegiatan	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	-
2	Rancangan Produk hukum tidak sesuai ketentuan yang berlaku	keterbatasan kompetensi SDM	1	5	5	- Pengusulan kepada Bagian SDM untuk mengikuti Diklat	- Pengiriman Diklat Perancang Peraturan	Semester I dan II	Sertifikat Pelatihan		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Kementerian Hukum dan HAM RI - Mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan secara mandiri	Perundang-undangan; dan - Mengikuti kursus singkat penyusunan peraturan perundang-undangan dan kontrak/kerja sama				
3	Penyusunan Produk Hukum tidak sesuai target penyelesaian	- Rancangan produk hukum dari unit kerja pemrakarsa belum memenuhi substansi - Unit kerja pemrakarsa tidak memiliki waktu untuk penyelesaian	4	3	12	Pengiriman Nota Dinas kepada pemrakarsa secara berkala dan melaksanakan asistensi dan pelibatan Biro Hukum dan Organisasi, dalam proses penyusunan rancangan Produk Hukum BPIP	- Penyampaian Nota Dinas secara berkala kepada unit kerja pemrakarsa - Pembuatan Rapat Koordinasi Penyelarasan dengan Unit Kerja Pemrakarsa	Semester I dan II	Nota Dinas dan Dokumen Rapat		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Rekomendasi Penataan Organisasi tidak ditindaklanjuti	Kebijakan eksternal organisasi	2	3	6	Evaluasi Kelembagaan setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> - Survei Kebutuhan Organisasi - Penyusunan Analisis Kebutuhan Organisasi 	Semester I dan II	Dokumen Laporan Kegiatan		
5	Nilai Reformasi Birokrasi tidak mencapai target	kesulitan pemenuhan data dukung	3	4	12	Penyampaian Nota Dinas kepada seluruh unit kerja dalam hal penyampaian data dukung	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Benchmark/</i> studi banding - Pembuatan Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala 	Semester I dan II	Dokumen Laporan Kegiatan		

B.6.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL BIRO PENGAWASAN INTERNAL

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
1	Terlaksananya Pengawasan Internal di lingkungan BPIP	Program Dukungan Manajemen	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian intern yang kurang memadai - ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan dengan auditan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan regulasi mengenai lingkungan pengendalian - Penyediaan Layanan Consulting/Asistensi kepada unit kerja 	Kepala Biro Pengawasan Internal
					Pelaksanaan Pengawasan tidak sesuai dengan standar	keterbatasan kompetensi SDM dan belum adanya pedoman pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Benchmark</i>/studi banding - Pengiriman Diklat untuk penguatan kompetensi - Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 	
					Auditan tidak atau terlambat menyampaikan data	komunikasi yang tidak lancar dan belum adanya komitmen pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Nota Dinas secara berkala kepada unit kerja - Pembuatan Rapat Pendahuluan Pemeriksaan dengan Auditan 	
			Nilai Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2,5	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mencapai target	Belum adanya regulasi tentang pengelolaan manajemen risiko dan belum melakukan analisis risiko korupsi dalam bentuk <i>Fraud Control Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen risiko - Penyusunan Register Risiko Korupsi (<i>Fraud Control Plan</i>) 	
				Kesulitan pemenuhan data dukung SPIP	Unit kerja belum mengetahui data dukung yang diperlukan dalam penilaian maturitas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Nota Dinas lintas unit kerja untuk pemenuhan daya dukung - Pembuatan Rapat Koordinasi Penilaian 		

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
						Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas SPIP secara berkala - Pengiriman Diklat Maturitas SPIP kepada unit kerja	

B.6.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL BIRO PENGAWASAN INTERNAL

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian intern yang kurang memadai - ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan dengan auditan 	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 dan kerangka regulasi dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 - Penyediaan Salinan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 di website JDIH BPIP - Pengiriman memorandum kepada unit kerja secara berkala dalam rangka mengingatkan untuk pengusulan Prosun Peraturan BPIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan regulasi mengenai lingkungan pengendalian - Penyediaan Layanan Consulting/Asistensi kepada unit kerja 	Semester I dan II	Regulasi dan Layanan Konsultansi	Kepala Biro Pengawasan Internal	-
2	Pelaksanaan Pengawasan tidak sesuai dengan standar	keterbatasan kompetensi SDM dan belum adanya pedoman	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan kepada Bagian SDM untuk mengikuti Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Benchmark/</i> studi banding - Pengiriman Diklat untuk 	Semester I dan II	<ul style="list-style-type: none"> -Laporan Kegiatan -Sertifikat Pelatihan dan 		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pelaksanaan pengawasan				Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Kementerian Hukum dan HAM RI - Mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan secara mandiri	penguatan kompetensi - Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan		-Pedoman Pelaksanaan Pengawasan		
3	Auditan tidak atau terlambat menyampaikan data	komunikasi yang tidak lancar dan belum adanya komitmen pimpinan	3	3	9	Pengiriman Nota Dinas kepada pemrakarsa secara berkala dan melaksanakan asistensi dan pelibatan Biro Hukum dan Organisasi, dalam proses penyusunan rancangan Produk Hukum BPIP	- Penyampaian Nota Dinas secara berkala kepada unit kerja - Pembuatan Rapat Pendahuluan Pemeriksaan dengan Auditan	Semester I dan II	Dokumen Laporan Kegiatan		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mencapai target	Belum adanya regulasi tentang pengelolaan manajemen risiko dan belum melakukan analisis risiko korupsi dalam bentuk <i>Fraud Control Plan</i>	2	4	8	Evaluasi Kelembagaan setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen risiko - Penyusunan Register Risiko Korupsi (<i>Fraud Control Plan</i>) 	Semester I dan II	Regulasi Pengelolaan Manajemen Risiko dan Register Risiko Korupsi		
5	Kesulitan pemenuhan data dukung SPIP	Unit kerja belum mengetahui data dukung yang diperlukan dalam penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2	4	8	Penyampaian Nota Dinas kepada seluruh unit kerja dalam hal penyampaian data dukung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Nota Dinas lintas unit kerja untuk pemenuhan daya dukung - Pembuatan Rapat Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP secara berkala - Pengiriman Diklat Maturitas SPIP kepada unit kerja 	Semester I dan II	Dokumen Laporan Kegiatan		

B.7.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila	Program Dukungan Manajemen	Tingkat Maturitas SPBE/Layanan Data dan Informasi	4	Indeks Maturitas SPBE tidak mencapai target	Perubahan regulasi dari Kementerian PAN RB dan kesulitan pemenuhan data dukung	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penilaian SPBE secara berkala	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
				Layanan Data dan Informasi terhambat	Adanya virus komputer dan kerusakan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	
				Pengelolaan Data dan Informasi tidak sesuai standar	Kurangnya Pemeliharaan sistem	Penyusunan Linimasa Pemeliharaan sistem	

B.7.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Maturitas SPBE tidak mencapai target	Perubahan regulasi dari Kementerian PAN RB dan kesulitan pemenuhan data dukung	3	4	12	Berkoordinasi antar unit kerja dalam pemenuhan data dukung	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penilaian SPBE secara berkala	Semester I dan II	Dokumen Rapat	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	-
2	Layanan Data dan Informasi terhambat	Adanya virus komputer dan kerusakan sarana dan prasarana	2	4	8	Penerapan SOP Layanan Data dan Informasi	Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	Semester I dan II	Layanan Pemeliharaan Data		
3	Pengelolaan Data dan Informasi tidak sesuai standar	Kurangnya Pemeliharaan sistem	2	3	6	Melakukan backup data secara reguler	Penyusunan Linimasa Pemeliharaan sistem	Semester I dan II	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi		

B.8.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
1	Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, kerjasama, Sosialisasi dan Jaringan serta Pembudayaan Ideologi Pancasila	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase Penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerjasama dalam rangka mengarusutamakan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	Terkendalanya Tindak lanjut kerjasama	Penyusunan Program dan Rencana Aksi Kerjasama belum menjadi prioritas mitra kerja	Alokasi Program dan Rencana Aksi Kerjasama dalam POK	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
					Monitoring Kerjasama tidak dilaksanakan	Anggaran belum sesuai kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran sesuai kebutuhan	
			Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik	4	Target sosialisasi dan komunikasi Pancasila tidak tercapai	Metode penyampaian materi sosialisasi dan komunikasi sulit dipahami	Penyusunan Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi	
						Anggaran belum sesuai kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran sesuai kebutuhan	
			Persentase Penilaian atas efektivitas jaringan dan pembudayaan nilai Pancasila	60-70%	Resistensi sasaran kegiatan	- Materi tidak tersampaikan - Belum adanya pedoman pembudayaan Nilai Pancasila	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Jaringan dan Pembudayaan Nilai Pancasila	

B.9.1. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tindak lanjut Hasil Kerjasama tidak dilaksanakan	Penyusunan Program dan Rencana Aksi Kerjasama belum menjadi prioritas mitra kerja	3	3	9	Menyampaikan Nota Dinas kepada Unit Kerja terkait kerjasama yang telah dilakukan	Alokasi Program dan Rencana Aksi Kerjasama dalam POK	Semester I dan II	Dokumen Program dan Rencana Aksi Kerjasama	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	-
2	Monitoring Kerjasama tidak dilaksanakan	Anggaran belum sesuai kebutuhan	2	3	6	Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Perpanjangan Batas Waktu Kerjasama PIP melalui optimalisasi anggaran dalam POK	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Aplikasi Kerjasama PIP - Menyampaikan lembar monitoring Kerjasama yang telah dilakukan - Menyusun SOP Monitoring Kerjasama 	Semester I dan II	Laporan Kegiatan		
3	Target sosialisasi dan komunikasi Pancasila tidak tercapai	Metode penyampaian materi sosialisasi dan komunikasi sulit dipahami	2	4	8	Pengendalian melalui TOR kepada narasumber	Penyusunan Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi	Semester I dan II	Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Anggaran belum sesuai kebutuhan	1	5	5	Mematuhi dan menjalani ketentuan SE Sestama BPIP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BPIP	Pelaksanaan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran secara berkala	Semester I dan II	Laporan Kegiatan		
4	Resistensi sasaran kegiatan	Materi tidak tersampaikan dan Belum adanya Pedoman Pembudayaan Nilai Pancasila	3	3	9	Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Proses Bisnis Jaringan dan Pembudayaan	Penyusunan Pedoman Jaringan dan Pembudayaan Nilai Pancasila	Semester I dan II	Pedoman Pelaksanaan Jaringan dan Pembudayaan Nilai Pancasila		

B.9.2. REGISTER RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
1	Terwujudnya (Perumusan Arah Kebijakan dan Rekomendasi) dan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang ditindaklanjuti	1	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti	Belum adanya Pedoman Penyusunan Rekomendasi	Pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
					Rekomendasi terlambat disampaikan	Keterbatasan Personel dan Kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan linimasa kegiatan Penyusunan Rekomendasi selama satu tahun - Pemberian Diklat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelarasan Rancangan Kebijakan dan Regulasi serta Hasil Kajian Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	20	Resistensi dari Kementerian/Lemba ga/Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan	Penanganan yang tidak tepat kepada sasaran kegiatan dan Ego Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Rapat Koordinasi Nasional mengenai Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila - Rapat Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri mengenai Penyampaian Rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan Pancasila 	

B.9.3. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti	Belum adanya Pedoman Penyusunan Rekomendasi	2	5	10	Pembentukan Tim Penyusun Rekomendasi dan Mengundang narasumber untuk memberikan pandangan terhadap rekomendasi yang hendak disusun	Pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi	Semester I dan II	Pedoman Penyusunan Rekomendasi	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	-
2	Rekomendasi terlambat disampaikan	Keterbatasan personel dan kompetensi SDM	2	4	8	Pembagian personel sesuai kebutuhan dan <i>benchmark</i> kepada instansi lain	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan linimasa kegiatan Penyusunan Rekomendasi selama satu tahun - Pemberian Diklat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 	Semester I dan II	Notulen Rapat dan Sertifikat Diklat		
3	Resistensi dari Kementerian/ Lembaga/	Penanganan yang tidak tepat kepada sasaran	2	4	8	Pembuatan Rapat Koordinasi dengan sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Rapat Koordinasi 	Semester I dan II	Notulen Rapat Kegiatan dan		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
	Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan	kegiatan dan Ego Sektoral				terkait dan melaksanakan Bimtek dan diseminasi mengenai institusionalisasi Pancasila	Nasional mengenai Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila - Rapat Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri mengenai Penyampaian Rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan Pancasila	Semester I dan II	Laporan Kegiatan		

B.10.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja	Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)	
1	Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase Hasil Kajian Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	Rekomendasi tidak dapat dihasilkan	Tidak adanya format rekomendasi yang ditetapkan oleh BPIP	Pembuatan format rekomendasi bagi seluruh unit kerja di BPIP	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
						Adanya Insersesi Pimpinan untuk menghasilkan output diluar rekomendasi yang menyedot sumber daya untuk menghasilkan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk penguatan komitmen dalam menyelesaikan output rekomendasi yang telah direncanakan awal tahun	
					Hasil kajian tidak diterima dan dijadikan rekomendasi	Tidak adanya koordinasi diantara unit deputi dengan penerima rekomendasi	Meningkatkan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan terkait melalui dukungan unit kerja di BPIP yang menangani urusan hubungan antar lembaga/kerjasama melalui Rapat Koordinasi	
					Rekomendasi yang dihasilkan tidak didukung oleh kajian/riset yang valid dan keikutsertaan <i>stakeholder</i> atau	Bekerja sama dengan Instansi atau kementerian/lembaga untuk melakukan riset/kajian melalui Rapat Koordinasi		

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
						pemangku kepentingan terkait rekomendasi		
					Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> (mitra kerja)	Perubahan sikap politik penerima rekomendasi mengenai isu yang diangkat dalam rekomendasi	Penyusunan strategi mitigasi terhadap kemungkinan adanya perubahan kondisi politik yang terjadi melalui Rapat Pimpinan	
						Kurangnya sumber Daya (anggaran dan peraturan) yang mendukung Implementasi rekomendasi yang dihasilkan	Peningkatan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan terkait memberikan dukungan dalam seluruh proses penyusunan dan tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui Rapat Koordinasi	

B.10.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekomendasi tidak dapat dihasilkan	Tidak adanya format rekomendasi yang ditetapkan oleh BPIP	5	2	10	Menggunakan Format Rekomendasi yang diberikan Renkeu berdasarkan contoh dari Kantor Staff Presiden (KSP)	Pembuatan format rekomendasi bagi seluruh unit kerja di BPIP	Semester I dan II	Pedoman Penyusunan Rekomendasi	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	-
		Adanya Inseresi Pimpinan untuk menghasilkan output diluar rekomendasi yang menyedot sumber daya untuk menghasilkan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam IKU	3	4	12	Penyesuaian capaian output rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan sumber daya (anggaran, tenaga) dan waktu	Pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk penguatan komitmen dalam menyelesaikan output rekomendasi yang telah direncanakan awal tahun	Semester I dan II	Dokumen Rapat		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Hasil kajian tidak diterima dan dijadikan rekomendasi	Tidak adanya koordinasi diantara unit deputy dengan penerima rekomendasi	2	4	8	dalam menghasilkan rekomendasi unit kerja selalu melibatkan pemangku kepentingan terkait terutama instansi/lembaga yang memiliki kewenangan terkait isu yang dibahas dalam rekomendasi yang disusun	Meningkatkan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan terkait melalui dukungan unit kerja di BPIP yang menangani urusan hubungan antar lembaga/kerjasama melalui Rapat Koordinasi	Semester I dan II	Dokumen Rapat		
		Rekomendasi yang dihasilkan tidak didukung oleh kajian/riset yang valid dan keikutsertaan <i>stakeholder</i> atau pemangku kepentingan terkait rekomendasi	2	4	8	Penggunaan metodologi riset dan kajian	Bekerja sama dengan Instansi atau kementerian/lembaga untuk melakukan riset/kajian melalui Rapat Koordinasi	Semester I dan II	Dokumen Rapat		
3	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> (mitra kerja)	Perubahan sikap politik penerima rekomendasi mengenai isu yang diangkat dalam rekomendasi	2	4	8	Perubahan output rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan arahan pimpinan	Penyusunan strategi mitigasi terhadap kemungkinan adanya perubahan kondisi politik yang terjadi	Semester I dan II	Dokumen Rapat		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							melalui Rapat Pimpinan				
		Kurangnya sumber Daya (anggaran dan peraturan) yang mendukung Implementasi rekomendasi yang dihasilkan	3	4	12	Koordinasi kepada instansi kementerian lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut	Peningkatan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan terkait memberikan dukungan dalam seluruh proses penyusunan dan tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui Rapat Koordinasi	Semester I dan II	Dokumen Rapat		

B.11.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
1	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase Hasil Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	Penyelenggaraan Diklat PIP tidak sesuai dengan Perencanaan yang disusun	Perencanaan Diklat PIP tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran	Rekomendasi Perencanaan Diklat PIP instansional dengan mengacu pada dokumen Cetak Biru Diklat PIP	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
						Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP	Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP	
			Persentase Pemanfaatan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	100%	Penyelenggaraan Diklat PIP tidak sesuai dengan standar dan kurikulum yang disusun	Standar dan kurikulum Diklat PIP tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran	Penyusunan standar dan kurikulum operasional Diklat PIP untuk setiap kelompok sasaran prioritas yang sesuai dengan Cetak Biru Diklat PIP	
				Tidak dilakukan diseminasi standar dan kurikulum Diklat PIP		Penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi diseminasi standar dan kurikulum Diklat PIP		
		50 s.d. 60%		Peserta Diklat tidak melakukan aktualisasi di komunitas		Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Peserta	Penyusunan indikator penilaian dan pelaksanaan penilaian aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh peserta Diklat	
			Tidak dilakukan pengukuran dampak dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh		Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pasca Diklat untuk menilai dampak dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang			

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
						Peserta terhadap komunitasnya	dilakukan oleh peserta Diklat	
			Persentase Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tersertifikasi	100%	Pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Diklat PIP	Persebaran Pengajar Diklat PIP yang tidak merata	Penyusunan rencana sertifikasi Pengajar Diklat PIP yang memuat skala prioritas kebutuhan pengajar Diklat PIP	
						Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara Diklat PIP	Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi lembaga penyelenggara Diklat PIP	

B.11.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Diklat PIP tidak sesuai dengan Perencanaan yang disusun	Perencanaan Diklat PIP tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran	2	2	4	Penyusunan perencanaan Diklat PIP secara nasional dalam bentuk Cetak Biru Sistem Diklat PIP secara	Rekomendasi Perencanaan Diklat PIP instansional dengan mengacu pada dokumen Cetak Biru Diklat PIP	Semester I dan II	Rekomendasi	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	-
		Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP	4	3	12	Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Diklat PIP	Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP	Semester I dan II	Dokumen Petunjuk Teknis		
2	Penyelenggaraan Diklat PIP tidak sesuai dengan standar dan kurikulum yang disusun	Standar dan kurikulum Diklat PIP tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran	2	3	6	Penyusunan kurikulum operasional Diklat PIP untuk segmentasi ASN, Prajurit TNI dan Anggota Polri, Organisasi Profesi Guru, DPRD, Kepala Desa, Komunitas,	Penyusunan standar dan kurikulum operasional Diklat PIP untuk setiap kelompok sasaran prioritas yang sesuai dengan Cetak Biru Diklat PIP	Semester I dan II	Dokumen Petunjuk Teknis	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	-
		Tidak dilakukan diseminasi standar dan kurikulum Diklat PIP	2	3	6	Penyusunan perencanaan diseminasi dan penyusunan petunjuk pelaksanaan	Penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi	Semester I dan II	Dokumen Petunjuk Teknis		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						diseminasi pengelolaan Diklat PIP	diseminasi standar dan kurikulum Diklat PIP				
3	Peserta Diklat tidak melakukan aktualisasi di komunitas	Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Peserta	5	5	25	Penyusunan panduan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh peserta Diklat	Penyusunan indikator penilaian dan pelaksanaan penilaian aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh peserta Diklat	Semester I dan II	Dokumen Laporan		
		Tidak dilakukan pengukuran dampak dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Peserta terhadap komunitasnya	5	5	25	Penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi pasca Diklat PIP	Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pasca Diklat untuk menilai dampak dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh peserta Diklat	Semester I dan II	Dokumen Laporan		
4	Pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Diklat PIP	Persebaran Pengajar Diklat PIP yang tidak merata	3	2	6	Pelaksanaan sertifikasi Pengajar Diklat PIP yang dibuka secara umum dan telah menerbitkan SK Pengajar Diklat PIP untuk 225 orang	Penyusunan rencana sertifikasi Pengajar Diklat PIP yang memuat skala prioritas kebutuhan pengajar Diklat PIP	Semester I dan II	Rekomendasi		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara Diklat PIP	3	2	6	Pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP kepada 12 (dua belas) lembaga diklat di Lembaga Negara, Kementerian / Lembaga, dan Pemerintah Daerah	Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi lembaga penyelenggara Diklat PIP	Semester I dan II	Dokumen Laporan		

B.12.1. REGISTER RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

No	Sasaran	Program	Target Indikator Kinerja		Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Unit Pemilik Risiko (UPR)
1	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase Rekomendasi Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	Rekomendasi tidak dimanfaatkan oleh <i>stakeholder</i>	Kebijakan Eksternal organisasi	Pelaksanaan Rapat Pimpinan secara berkala	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
						Belum adanya pedoman Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi PIP	Pelaksanaan Rapat Penyusunan pedoman pengendalian dan evaluasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait	
			Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan			Rancangan Rekomendasi belum memenuhi ketentuan untuk direkomendasikan	Rekomendasi yang dibuat tidak didukung oleh kajian yang valid dan tidak mengikutsertakan <i>stakeholder</i> terkait	
					Adanya insersi pimpinan untuk menghasilkan output diluar rekomendasi dan menyedot sumber daya untuk menghasilkan rekomendasi sesuai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Penyusunan linimasa kegiatan dan pembagian tugas selama satu tahun		

B.12.2. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekomendasi tidak dimanfaatkan oleh <i>stakeholder</i>	Kebijakan Eksternal organisasi	3	3	9	Penyampaian Nota dinas kepada unit kerja terkait mengenai Rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan pengendalian dan Evaluasi	Pelaksanaan Rapat Pimpinan secara berkala	Semester I dan II	Notulen Rapat	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	-
		Belum adanya pedoman Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi PIP				Penyusunan Rapat persiapan Penyusunan Pedoman, Pelaksanaan <i>Benchmark</i> , hingga membuat Tim Penyusun Pedoman	Pelaksanaan Rapat Penyusunan pedoman pengendalian dan evaluasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait	Semester I dan II	Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi		
2	Rancangan Rekomendasi belum memenuhi ketentuan untuk direkomendasikan	Rekomendasi yang dibuat tidak didukung oleh kajian yang valid dan tidak mengikutsertakan <i>stakeholder</i> terkait	3	3	9	Pelaksanaan Rapat dengan mengundang narasumber dan melaksanakan rapat dengan instansi terkait dalam menyusun rancangan rekomendasi		Semester I dan II	Sertifikat Keikutsertaan Diklat		
		Adanya insersi pimpinan untuk menghasilkan output diluar				Pelaksanaan Rapat koordinasi internal Kedeputian	Penyusunan linimasa kegiatan dan pembagian	Semester I dan II	Notulen Rapat		

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang Sudah Dilakukan	Penanganan yang Akan Dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	PIC	Anggaran
		rekomendasi dan menyedot sumber daya untuk menghasilkan rekomendasi sesuai IKK					tugas selama satu tahun				

C.2. KODE REGISTER RISIKO (RR) DAN KODE RENCANA TINDAK PENANGANAN (RTP) PADA RISIKO STRATEGIS DAN RISIKO OPERASIONAL BPIP

A. KODE REGISTER RISIKO DAN KODE RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO STRATEGIS BPIP

Koordinator : Komite Pengelolaan Risiko Strategis dan Operasional
Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

A.1. Register Risiko Strategis BPIP

A.1.1 Fungsi koordinasi internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan oleh BPIP;

A.1.2 Kelembagaan BPIP hilang;

A.1.3 Nilai-nilai Pancasila tidak terlembaga dalam kebijakan pembangunan nasional dan perundang-undangan;

A.1.4 BPIP tidak memiliki indikator nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional;

A.1.5 Nilai-nilai Pancasila tidak digunakan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

A.1.6 Target tidak tercapai sesuai ketetapan IKSS.

A.2. Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis BPIP

A.2.1 - Evaluasi capaian rencana strategis;

- Evaluasi berkala proses bisnis BPIP;

- Peraturan Presiden tentang Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025-2029;

- Membentuk Bakokerma (badan koordinasi kerjasama dengan K/L lain);

- Membentuk kerjasama dengan Perguruan tinggi pada mahasiswa penggerak Pancasila (KKN tematik Pancasila);

- Pembentukan sarana kerjasama dan database kerjasama antar lembaga berbasis elektronik;

- Penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama pembinaan ideologi Pancasila (PIP); dan

- Penyelenggaraan serta evaluasi pelaksanaan sosialisasi Pancasila.

A.2.2 - Finalisasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) BPIP; dan

- Pembahasan RUU dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

A.2.3 - Tindak lanjut rekomendasi atas hasil penyelarasan;

- Tindak lanjut rekomendasi atas hasil kajian;

- Tindak lanjut rekomendasi atas hasil advokasi;

- Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP;

- Penyelenggaraan Diklat PIP bagi anggota legislatif;

- Diklat PIP bagi Kepala Desa;

- Diklat PIP bagi ASN dan anggota TNI/Polri;

- Diklat PIP bagi komunitas; dan

- Penilaian atas maturitas pengendalian dan maturitas evaluasi PIP di lingkungan BPIP.

- A.2.4 - Internalisasi indikator nilai Pancasila dalam produk hukum kepada perancang perundang-undangan, analisis hukum dan akademisi;
 - Mendorong indeks aktualisasi Pancasila (IAP) menjadi Indeks Capaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah melalui rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri; dan
 - Diseminasi dan Akseptasi hasil pengukuran pelebagaan Pancasila kepada K/L/Pemda.

- A.2.5 - Penyelenggaraan Hari Lahir Pancasila di lokasi bertema Pancasila;
 - Penguatan kegiatan relawan kebajikan Pancasila;
 - Advokasi PIP di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);
 - Monitoring dan evaluasi pemanfaatan buku teks utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama;
 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat PIP dengan berbagai elemen masyarakat, ASN, dan Personel TNI/POLRI; dan
 - Monitoring hasil pengendalian atas program PIP.

- A.2.6 - Tindak lanjut rencana aksi reformasi birokrasi;
 - Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP;
 - Perubahan rencana strategis dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - Penguatan fungsi manajemen keuangan dan pengawasan;
 - Penguatan implementasi manajemen kinerja;
 - Implementasi pelaksanaan manajemen talenta; dan
 - Peningkatan nilai fungsi aplikasi dan pengelola.

B. KODE REGISTER RISIKO DAN KODE RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL BPIP

Koordinator : Kelompok Kerja Pengelolaan Risiko Operasional

Unit Kerja : Biro Hukum dan Organisasi c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

B.1.1 Register Risiko Operasional Sekretariat Utama

B.1.1.1 Terdapat kebijakan eksternal yang mempengaruhi organisasi

B.1.1.2 Indikator Kinerja tidak mencapai target

B.1.1.3 Temuan pemeriksa dan/atau auditor internal

B.1.1.4 Laporan kinerja organisasi terlambat disampaikan

B.1.1.5 Perubahan struktur organisasi dan tata kerja

B.1.2 Rencana Tindak Pengendalian Operasional Sekretariat Utama

B.1.2.1 - Reviu anggaran oleh Biro Pengawasan Internal

- Penguatan manajemen kinerja

- Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pegawai

B.1.2.2 - Pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat terbatas secara berkala

- Monitoring dan evaluasi oleh Biro Perencanaan Keuangan dan Biro Pengawasan Internal

- B.1.2.3 Penguatan SPIP dan monitoring tindak lanjut pemeriksaan BPK berkala
- B.1.2.4 Penyampaian nota dinas dan penguatan koordinasi antar unit kerja
- B.1.2.5 Penguatan proses bisnis dan budaya kerja

- B.2.1 Register Risiko Operasional Biro Perencanaan dan Keuangan
 - B.2.1.1 Penyusunan rencana kerja tidak tepat waktu
 - B.2.1.2 Dokumen perencanaan tidak sesuai standar
 - B.2.1.3 Aplikasi tidak dapat digunakan
 - B.2.1.4 Penyampaian data eksternal terlambat
 - B.2.1.5 Penyusunan laporan kinerja tidak tepat waktu
 - B.2.1.6 Laporan kinerja tidak tersusun

- B.2.2 Rencana Tindak Pengendalian Operasional Biro Perencanaan Dan Keuangan
 - B.2.2.1 Pelaksanaan rapat teknis perencanaan
 - B.2.2.2 Pelaksanaan rapat teknis perencanaan
 - B.2.2.3 Penyusunan Linimasa pelaporan keuangan
 - B.2.2.4 Meminta bagian barang milik negara untuk menjalin koordinasi dengan PPK mengenai pencatatan aset dan persediaan
 - B.2.2.5 - Memberikan contoh template Laporan Kinerja sesuai Format dari Kemenpan RB
 - Sosialisasi pada Rapat Penyusunan Laporan Kinerja

- B.3.1 Register Risiko Operasional Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
 - B.3.1.1 Barang Milik Negara rusak dan/atau hilang
 - B.3.1.2 Penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses pengadaan
 - B.3.1.3 Kesalahan dalam penyusunan HPS, kontrak pengadaan, dan spesifikasi
 - B.3.1.4 Nilai sistem merit dan indeks profesionalisme ASN tidak mencapai target
 - B.3.1.5 Unit kerja tidak terfasilitasi layanan BMN, Kerumahtanggaan, dan Sumber Daya Manusia

- B.3.2 Rencana Tindak Pengendalian Operasional Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
 - B.3.2.1 Penanganan menggunakan asuransi terhadap beberapa Barang Milik Negara dan Implementasi Peraturan BPIP tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara
 - B.3.2.2 Penguatan Fungsi Pengaduan dan Penerapan Pengadaan secara elektronik
 - B.3.2.3 - Melaksanakan Refreshment Peraturan Pengadaan
 - Penyusunan Linimasa Rencana Pengadaan
 - B.3.2.4 Pelaksanaan Survei Kebutuhan BMN
 - B.3.2.5 Sosialisasi Penilaian Sistem Merit dan Indeks Profesionalisme ASN kepada seluruh unit kerja dan optimalisasi peran Tata Usaha
 - B.3.2.6 Survei Kebutuhan BMN dan Layanan SDM kepada unit kerja

- B.4.1 Register Risiko Operasional Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi
 - B.4.1.1 Unsur Pimpinan tidak puas terhadap layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan
 - B.4.1.2 Pelayanan administrasi Unsur Pimpinan tidak tertib dan tidak optimal
 - B.4.1.3 Agenda Rapat Unsur Pimpinan tidak terstruktur
 - B.4.1.4 Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak mencapai target
 - B.4.1.5 Pengaduan Masyarakat tidak ditindaklanjuti
 - B.4.1.6 Penyampaian Informasi publik tidak akurat
 - B.4.1.7 Nilai Pengawasan Kearsipan tidak mencapai target
 - B.4.1.8 Pengelolaan Arsip tidak sesuai standar

- B.4.2 Rencana Tindak Pengendalian Operasional Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi
 - B.4.2.1 - Perbaiki SOP Layanan Protokol dan administrasi yang sudah ada
 - Pelaksanaan *Benchmark*/studi banding
 - B.4.2.2 Penyusunan SOP Pelayanan Administrasi
 - B.4.2.3 Perbaiki SOP Pelaksanaan Rapat Pimpinan
 - B.4.2.4 - Sosialisasi Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik
 - Penyampaian Nota Dinas kepada unit kerja terkait Layanan Data dan Informasi
 - *Benchmark*/studi banding
 - B.4.2.5 Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - B.4.2.6 Penyusunan SOP Penanganan Penyampaian Informasi Publik
 - B.4.2.7 - Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan SDM dalam penyediaan sarana pengelolaan arsip
 - Pengembangan Aplikasi Monitoring Arsip
 - B.4.2.8 Penyediaan Ruang Kerja Arsiparis dan Ruang Pengelolaan arsip

- B.5.1 Register Risiko Operasional Biro Hukum Dan Organisasi
 - B.5.1.1 Rancangan Produk Hukum tidak ditindaklanjuti
 - B.5.1.2 Rancangan Produk hukum tidak sesuai ketentuan yang berlaku
 - B.5.1.3 Penyusunan Produk Hukum tidak sesuai target penyelesaian
 - B.5.1.4 Rekomendasi Penataan Organisasi tidak ditindaklanjuti
 - B.5.1.5 Nilai Reformasi Birokrasi tidak mencapai target

- B.5.2 Rencana Tindak Pengendalian Operasional Biro Hukum dan Organisasi
 - B.5.2.1 - Berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melibatkan Sekretariat Kabinet dalam Rapat pelaksanaan harmonisasi
 - Asistensi Penyusunan Program Penyusunan Produk Hukum
 - B.5.2.2 - Pengiriman Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
 - Mengikuti kursus singkat penyusunan peraturan perundang-undangan dan kontrak/kerja sama
 - B.5.2.3 - Penyampaian Nota Dinas secara berkala kepada unit kerja pemrakarsa

- Pembuatan Rapat Koordinasi Penyelarasan dengan Unit Kerja Pemrakarsa
- B.5.2.4 - Survei Kebutuhan Organisasi
 - Penyusunan Analisis Kebutuhan Organisasi
- B.5.2.5 - Benchmark/studi banding
 - Pembuatan Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala
- B.6.1 Register Risiko Operasional Biro Pengawasan Internal
 - B.6.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak ditindaklanjuti
 - B.6.1.2 Pelaksanaan Pengawasan tidak sesuai dengan standar
 - B.6.1.3 Auditan tidak atau terlambat menyampaikan data
 - B.6.1.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mencapai target
 - B.6.1.5 Kesulitan pemenuhan data dukung SPIP
- B.6.2 Rencana Tindak Pengendalian Operasional Biro Pengawasan Internal
 - B.6.2.1 - Pembuatan regulasi mengenai lingkungan pengendalian
 - Penyediaan Layanan Consulting/Asistensi kepada unit kerja
 - B.6.2.2 - *Benchmark*/studi banding
 - Pengiriman Diklat untuk penguatan kompetensi
 - Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
 - B.6.2.3 - Penyampaian Nota Dinas secara berkala kepada unit kerja
 - Pembuatan Rapat Pendahuluan Pemeriksaan dengan Auditan
 - B.6.2.4 - Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen risiko
 - Penyusunan Register Risiko Korupsi (*Fraud Control Plan*)
 - B.6.2.5 - Penyampaian Nota Dinas lintas unit kerja untuk pemenuhan daya dukung
 - Pembuatan Rapat Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP secara berkala
 - Pengiriman Diklat Maturitas SPIP kepada unit kerja
- B.7.1 Register Risiko Operasional Pusat Data Dan Teknologi Informasi
 - B.7.1.1 Indeks Maturitas SPBE tidak mencapai target
 - B.7.1.2 Layanan Data dan Informasi terhambat
 - B.7.1.3 Pengelolaan Data dan Informasi tidak sesuai standar
- B.7.2 Rencana Tindak Pengendalian Operasional Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - B.7.2.1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penilaian SPBE secara berkala
 - B.7.2.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala
 - B.7.2.3 Penyusunan Linimasa Pemeliharaan sistem
- B.8.1 Register Risiko Operasional Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, Dan Jaringan
 - B.8.1.1 Terkendalanya Tindak lanjut kerjasama
 - B.8.1.2 Monitoring Kerjasama tidak dilaksanakan
 - B.8.1.3 Target sosialisasi dan komunikasi Pancasila tidak tercapai
 - B.8.1.4 Resistensi sasaran kegiatan

- B.8.2 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Operasional Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
 - B.8.2.1 Alokasi Program dan Rencana Aksi Kerjasama dalam POK
 - B.8.2.2 - Membuat Aplikasi Kerjasama PIP
 - Menyampaikan lembar monitoring Kerjasama yang telah dilakukan
 - Menyusun SOP Monitoring Kerjasama
 - B.8.2.3 Penyusunan Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi
 - B.8.2.4 Pelaksanaan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran secara berkala
 - B.8.2.5 Penyusunan Pedoman Jaringan dan Pembudayaan Nilai Pancasila

- B.9.1 Register Risiko Operasional Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
 - B.9.1.1 Rekomendasi tidak ditindaklanjuti
 - B.9.1.2 Rekomendasi terlambat disampaikan
 - B.9.1.3 Resistensi dari Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan

- B.9.2 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Operasional Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
 - B.9.2.1 Pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi
 - B.9.2.2 - Pembuatan linimasa kegiatan Penyusunan Rekomendasi selama satu tahun
 - Pemberian Diklat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
 - B.9.2.3 - Pembuatan Rapat Koordinasi Nasional mengenai Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila
 - Rapat Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri mengenai Penyampaian Rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan Pancasila

- B.10.1 Register Risiko Operasional Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
 - B.10.1.1 Rekomendasi tidak dapat dihasilkan
 - B.10.1.2 Hasil kajian tidak diterima dan dijadikan rekomendasi
 - B.10.1.3 Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh *stakeholder* (mitra kerja)

- B.10.2 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Operasional Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
 - B.10.2.1 - Pembuatan format rekomendasi bagi seluruh unit kerja di BPIP
 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk penguatan komitmen dalam menyelesaikan *output* rekomendasi yang telah direncanakan awal tahun
 - Meningkatkan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan terkait melalui dukungan unit kerja di BPIP yang menangani urusan hubungan antar lembaga/kerjasama melalui Rapat Koordinasi

- Bekerja sama dengan Instansi atau kementerian/lembaga untuk melakukan riset/kajian melalui Rapat Koordinasi
- B.10.2.2 - Penyusunan strategi mitigasi terhadap kemungkinan adanya perubahan kondisi politik yang terjadi melalui Rapat Pimpinan
 - Peningkatan koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan terkait memberikan dukungan dalam seluruh proses penyusunan dan tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui Rapat Koordinasi
- B.11.1 Register Risiko Operasional Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - B.11.1.1 Penyelenggaraan Diklat PIP tidak sesuai dengan Perencanaan yang disusun
 - B.11.1.2 Penyelenggaraan Diklat PIP tidak sesuai dengan standar dan kurikulum yang disusun
 - B.11.1.3 Peserta Diklat tidak melakukan aktualisasi di komunitas
 - B.11.1.4 Pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Diklat PIP
- B.11.2 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Operasional Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - B.11.2.1 - Rekomendasi Perencanaan Diklat PIP instansional dengan mengacu pada dokumen Cetak Biru Diklat PIP
 - Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP
 - B.11.2.2 - Penyusunan standar dan kurikulum operasional Diklat PIP untuk setiap kelompok sasaran prioritas yang sesuai dengan Cetak Biru Diklat PIP
 - Penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi diseminasi standar dan kurikulum Diklat PIP
 - B.11.2.3 - Penyusunan indikator penilaian dan pelaksanaan penilaian aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh peserta Diklat
 - Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pasca Diklat untuk menilai dampak dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh peserta Diklat
 - B.11.2.4 - Penyusunan rencana sertifikasi Pengajar Diklat PIP yang memuat skala prioritas kebutuhan pengajar Diklat PIP
 - Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi lembaga penyelenggara Diklat PIP
- B.12.1 Register Risiko Operasional Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - B.12.1.1 Rekomendasi tidak dimanfaatkan oleh *stakeholder*
 - B.12.1.2 Rancangan Rekomendasi belum memenuhi ketentuan untuk direkomendasikan

B.12.2 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Operasional Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

- B.12.2.1 - Pelaksanaan rapat pimpinan secara berkala
 - Pelaksanaan rapat penyusunan pedoman pengendalian dan evaluasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja terkait
- B.12.2.2 - Pengiriman SDM untuk mengikuti Diklat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
 - Penyusunan linimasa kegiatan dan pembagian tugas selama satu tahun

SEKRETARIS UTAMA,

TONNY AGUNG ARIFIANTO

